

detiknews

Adsmart Terpopuler Daerah ▾ Hoax or Not Suara Pembaca Pilkada 2024 Tapal Batas

detiknews Home Berita Jabodetabek Internasional Hukum detikX Kolom Blak blakan Pro Kontra Infografis Foto Video Indeks

detikNews > Kolom

Kolom

Mengkaji Permintaan Wapres soal Penghapusan Zonasi PPDB

Achilleus Hermawan Astyanto - [detikNews](#)

Kamis, 05 Des 2024 13:30 WIB



Foto ilustrasi: Engran Eko Budianto

Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) untuk menghapus sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal ini cukup mengejutkan mengingat akhir tahun ajaran masih lama. Pro dan kontra pun muncul.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) segera merilis survei yang kemudian berujung pada rekomendasi agar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tidak tergesa-gesa memutuskan. Sementara itu, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengusulkan perlunya kajian akademik yang objektif terkait gagasan ini.

Di sisi lain, Mendikdasmen menyatakan bahwa PPDB dengan sistem zonasi terus dikaji, sedangkan Ombudsman merespons cepat dengan menyebutkan bahwa sistem zonasi memiliki relevansi untuk mendorong pemerataan kualitas dan fasilitas pendidikan.

Masih Meninggalkan Residu

Semenjak diimplementasikan pada 2017 lalu, kebijakan zonasi dalam PPDB memang acap memantik persoalan menjelang tahun ajaran baru. Sistem yang dirilis melalui Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 dan kemudian diperkuat oleh Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 ini dinilai masih meninggalkan residu ketidakpuasan pada sisi transparansi hingga akuntabilitas. Bahkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 yang semestinya turut membangun sistem pendukung yang kokoh pun belum berhasil menutup celah yang pada akhirnya masih diisi oleh praktik-praktik yang dinilai melukai rasa keadilan.

Dicermati dari beberapa pemberitaan, hingga akan menginjak tahun kedelapan diimplementasikan, tidak sedikit lapisan masyarakat di tataran akar rumput masih mengeluhkan kesulitan hingga kekhawatiran mengikuti proses PPDB dengan sistem zonasi. Selain dinilai perlu strategi menakar peluang dari berbagai pilihan jalur yang disediakan, minimnya sosialisasi terhadap dinamika penyesuaian turut berkontribusi pada pemahaman yang tidak utuh.

Dalam kasus tertentu, bahkan hal ini masih diperparah oleh kegagahan sebagian masyarakat mengoptimalkan aplikasi teknologi. Alhasil, meskipun berbagai informasi telah disediakan hingga didukung oleh kemudahan aksesibilitas, berbagai persoalan masih ditemui baik dari aspek teknis seperti gangguan pada server hingga aspek non teknis seperti pungli. Mirisnya permasalahan itu terindikasi terjadi di berbagai tingkatan dari sekolah dasar hingga sekolah menengah. Hal ini kuat mengimplikasikan bahwa instrumen evaluasi yang transparan dan akuntabel adalah hal mendesak.

Realitanya, dalam implementasi sistem zonasi PPDB tidak jarang ditemui praktik-praktik kecurangan. Praktik titip kartu keluarga adalah salah satunya. Sudah bukan rahasia lagi bahwa sebagian masyarakat memanfaatkan celah ini. Padahal praktik manipulatif seperti ini kontraproduktif terhadap landasan gagasan kebijakan zonasi PPDB yaitu menghapuskan "favoritisme" dan "kastaniasi" di sekolah negeri. Satu catatan penting, tindak lanjut untuk mengatasi fenomena masih dipertanyakan.

Lainnya adalah marak keluhan masyarakat terhadap praktik yang memanfaatkan pengaruh figur tertentu hingga kuasa uang untuk mendapatkan bangku di sekolah negeri yang diinginkan. Praktik yang dalam pemberitaannya pernah populer disebut "jalur siluman" ini tidak hanya memantik keresahan, melainkan juga mengkhianati transparansi dan akuntabilitas dan berujung pada terkesampingkannya hak calon peserta didik atas keadilan.

Menjawab Rumusan Konkret

detikpilkada

Ketahui kandidat Pemimpin Daerahmu

Cari Tahu



Rekap Tingkat Kota Pramono-Rano Raup 50,07%, PDIP: Menang 1 Putaran	Saksi Airin-Ade Tolak Tandatangani Hasil Rekapitulasi Pilgub Banten di Lebak
--	--

Berita Terpopuler

- #1 Arah Angin Politik Berbalik ke Presiden Korsel
- #2 Rekap Tingkat Kota Pramono-Rano Raup 50,07%, PDIP: Menang 1 Putaran
- #3 Tuntutan Penjara bagi Helena Lim Sewindu Lamanya
- #4 Tak Jera Polisi Gadungan Peras Warga Jakarta Meski Sudah Dipenjara
- #5 5 Strategi Kapolri Bikin Bandar hingga Pengedar Mati Kutu di RI

[Lihat Selengkapnya →](#)

Foto

6 Foto

6 Foto

Foto News

Geger Penikaman di Minimarket Kanada, Pelaku Ditembak Mati

Foto News

Warga Lebanon Pindahkan Jenazah Keluarga di Tengah Gencatan Senjata

Wajar saja ada yang kontra dan merasa dirugikan, sementara lainnya mendukung karena diuntungkan. Terlepas dari sikap masyarakat yang masih terbelah dalam implementasinya, apresiasi sebagian masyarakat melalui FSGI, P2G hingga Ombudsman terhadap langkah berani ini semestinya adalah dukungan moril bagi pelaksana untuk bergerak mencapai tujuannya.

Persoalannya, pada implementasinya yang akan memasuki tahun ke delapan, hasil pengukuran capaian kebijakan ini belum kunjung dipublikasikan secara gamblang dan mudah dipahami masyarakat luas. Apalagi, jika merujuk pada hasil survei skor Program Penilaian Pelajar Internasional (PISA) yang dipublikasikan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) pada akhir 2023 lalu, justru terungkap tren penurunan skor PISA siswa sekolah menengah di Indonesia yang masih berlangsung pada 2022. Oleh karenanya, sekalipun diproyeksikan sebagai kebijakan jangka panjang, instrumentasi penilaian yang spesifik mengukur capaian implementasi kebijakan zonasi PPDB ini memang mendesak.

Pada akhirnya, berangkat dari prinsip bahwa setiap kebijakan berlandaskan filosofi hingga tanggung jawab moral, serta perumusan kebijakan semestinya dilandasi kajian ilmiah yang relevan, hasil implementasi kebijakan setidaknya perlu menjawab rumusan konkret permasalahan yang paling mendasar. Sulit memang mengamini bahwa sistem dan ekosistem pendidikan bangsa kita saat ini selaras dengan visi Indonesia Emas. Oleh karenanya, tantangan Kemendikdasmen adalah meyakinkan publik melalui pembuktian terukur bahwa kebijakan yang diterapkan telah berimpak pada kemanfaatan, bukan bersirkulasi pada efek samping yang kontraproduktif. Bagaimanapun juga, menyoal korelasi kebijakan zonasi PPDB dan akselerasi pemerataan kualitas pendidikan adalah bagian dari pemikiran yang kritis.

Achilleus Hermawan Astyanto akademisi Universitas Sanata Dharma

(mmu/mmu)

sistem zonasi ppdb

#BerubahJadiLebihBaik, Berburu Cashback Rp 1,2 Juta di ruparupa

Berita Terkait

Cancil Culture dan Penghakiman Digital

Diabetes Bukan Dari Makanan Manis! Temui Musuh Utama Diabetes

Promoted

OTT Tak Relevan Lagi dalam Memberantas Korupsi?

Tax Amnesty, PPN 12 Persen, dan Pertumbuhan Ekonomi

Sinergi Wujudkan Asta Cita

Video: Bukan Hapus Sistem Zonasi, Ombudsman Rekomendasikan Ini untuk Masalah Pendidikan

Mimpi Indonesia Jadi Raja Energi Hijau, Mungkinkah Tercapai?

Menilik Tata Kelola BPDLH

Foto News

Aksi Nyala Lilin Warga Korsel Desak Presiden Yoon Suk Yeol Mundur

Foto News

Potret Permukiman Semi Permanen di Kolong Tol Angke yang Bakal Dibongkar

Lihat Selengkapnya →

Rekomendasi untuk Anda

Selengkapnya >

n

detikNews

Prancis-Arab Saudi Akan Gelar Konferensi Pembentukan Negara Palestina

Promoted

Sedekah Menjemput Berkah!

detikNews

Jubir PCO Minta Maaf soal Diksi Rakyat Jelata: Tak Ada Maksud Merendahkan



c

detikPop

Guyunan Gus Miftah di Mata Komika

detikJateng

Jawaban Jokowi soal Dirinya Disebut Hasto Bukan Lagi Bagian PDIP

Sepakbola

Indonesia Vs Kamboja: Garuda Pertwi Juara Piala AFF Putri 2024



Berita detikcom Lainnya

Wolipop

5 Gaya Jolie Pakai Dress Tanpa Lengan, Tato Titik Koordinat Bikin Salfok

detikNews

Tak Jera Polisi Gadungan Peras Warga Jakarta Meski Sudah Dipenjara

Sedekah Menjemput

Berkah!
Promoted

detikOto

Paus Fransiskus Dapat Mobil Baru, Begini Wujudnya

**detikFood**

Wika Salim Makan Malam Mewah dan Kulineran di Eropa

Sepakbola

Hasil Undian Piala Dunia Antarklub: Man City & Juventus Satu Grup

detikNet

Keren! Unboxing Tecno Spark 30 Pro Edisi Transformers

detikHealth

Curhat Bidan Karawang Lawan Stunting, Harus Hadapi Penolakan Ortu-Mitos Masyarakat

Tulis Komentar

1000 Karakter tersisa

Kirim ➤

Terbaru

Terpopuler

Teramai

Komentar yang disematkan



Yopi Pialamurti

16 Jam yang lalu

Lupakan impian indonesia emas jika ppdb masih menggunakan sistem zonasi, karena zonasi hanya akan membentuk generasi bodoh.

0 Balas

...

detikcom

part of  detiknetwork

Connect With Us



Copyright @ 2024 detikcom.
All right reserved

Kategori	Layanan	Informasi	Jaringan Media
detikNews	detikTravel	berbuatbaik.id	CNN Indonesia
detikEdukasi	detikFood	Pasang Mata	CNBC Indonesia
detikFinance	detikHealth	Adsmart	Haibunda
detikNet	Wolipop	detikEvent	Insertlive
detikHot	detikX	Signature Awards	Beautynesia
detikSport	20Detik	Trans Snow World	Female Daily
Sepakbola	detikFoto	Trans Studio	CXO Media
detikOto	detikHikmah	Bingkai.id	Privacy Policy
detikProperti	detikPop	Ziswafctarsa.id	Disclaimer
		Flying Over Indonesia	